

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INVESTASI TERHADAP PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

**I Ketut Gede Pande Supriawan¹
Sudarsana Arka²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: pandesupriawan@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran dan kemiskinan satu sama lain saling terkait. Sulit bagi pemerintah menciptakan lapangan kerja baru tanpa pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran juga akan meningkat. Kemiskinan telah mejadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran dan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2009-2015. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa; (i) Pertumbuhan ekonomi dan investasi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. (ii) Pertumbuhan ekonomi dan investasi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Langkah kebijakan yang perlu juga dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, dengan cara; peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan kerja sehingga tercipta tenaga kerja yang berkualitas, perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan ke luar negeri, serta pemetaan potensi tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali harus sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Kata kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengangguran, Kemiskinan.*

ABSTRACT

Economic growth, investment, unemployment and poverty are interrelated. It is difficult for the government to create new jobs without economic growth, so the unemployment rate will also increase. Poverty has become a major concern in the development of social policy. The purpose of this study was to analyze the effect of economic growth and investment on unemployment and poverty in Bali Province districts/cities in 2009-2015. Based on the results of the analysis it was found that; (i) Economic growth and direct investment do not have a significant effect on unemployment in the districts/cities of Bali Province. (ii) Economic growth and investment directly have a negative and significant effect on poverty in Bali's districts/cities. The policy steps that need to be taken also to overcome the problem

of unemployment and poverty in the regencies/cities of Bali Province, by way of; improving the quality of human resources through work education and training so as to create quality workforce, expanding employment opportunities in the country and abroad, as well as mapping the workforce potential in all districts/cities of the Province of Bali must be in accordance with their abilities and expertise.

keyword: *Economic Growth, Investment, Unemployment, Poverty.*

PENDAHULUAN

Menurut Tambunan (2003), masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat.

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu mencukupi kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu. Kemiskinan di negara berkembang biasanya dihubungkan dengan masalah kemakmuran (*welfare economics*) yang merujuk pada konsumsi barang dan jasa (Kuncoro, 1997: 103).

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan

memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk, 2008).

Menurut Cahyo (2013: 22), kemiskinan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mereka yang tergolong miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti contohnya tanah yang cukup, modal dan juga keterampilan yang memadai sehingga menyebabkan kemampuan untuk memperoleh pendapatan sangat terbatas;
- 2) Banyak penduduk yang tidak memiliki motivasi dan tidak memiliki niat untuk melangkah maju;
- 3) Masih banyak penduduk tidak memiliki keterampilan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri;
- 4) Tingkat Pendidikan penduduk yang masih rendah;
- 5) Biasanya penduduk tersebut lebih banyak tinggal di daerah pedesaan;
- 6) Mereka yang hidup di kota atau penduduk yang akan melakukan mobilitas ke kota yang masih berusia muda tidak mempunyai keterampilan/*hard skill*.

Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia. Faktor-faktor pemicu kemiskinan yang paling sering terjadi adalah kurangnya keterampilan (*hard skill*) yang dimiliki. Untuk era globalisasi seperti saat ini sangat diperlukan adanya keterampilan sejak usia muda, terutama apabila penduduk berusia muda tersebut melakukan mobilisasi atau perpindahan dari desa ke kota untuk memperoleh pekerjaan.

Tingkat Pendidikan yang rendah juga menghambat seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan karena perusahaan akan melihat standar berdasarkan tingkat pendidikan seseorang sebelum diterima bekerja di perusahaan

tersebut. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu target kebijakan pembangunan di setiap negara agar kesenjangan pendapatan menjadi semakin kecil.

Kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali sampai saat ini masih ada dan masih menjadi suatu permasalahan yang berkepanjangan (BPS Provinsi Bali). Program pengentasan kemiskinan dewasa ini telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui peran instansi terkait, namun jumlah masyarakat miskin belum dapat dihapuskan seratus persen. Hal ini ditunjukkan dari data bahwa jumlah masyarakat yang masih tergolong kurang mampu tetap ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali (Yuliarmi, 2014). Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali tidak terlepas dari upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk program-program *pro-poor*. Berikut adalah data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2009-2015.

**Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Periode Tahun 2009-2015 (%)**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kab. Jembrana	6,80	8,11	6,56	5,74	5,56	5,83	5,84
2.	Kab. Tabanan	4,99	6,96	5,62	4,90	5,21	5,61	5,52
3.	Kab. Badung	3,28	3,23	2,62	2,16	2,46	2,54	2,33
4.	Kab. Gianyar	5,76	6,68	5,40	4,69	4,27	4,57	4,61
5.	Kab. Klungkung	5,23	7,58	6,10	5,37	7,01	7,01	6,91
6.	Kab. Bangli	5,18	6,41	5,16	4,52	5,45	5,86	5,73
7.	Kab. Karangasem	6,37	7,95	6,43	5,63	6,88	7,30	7,44
8.	Kab. Buleleng	5,95	7,35	5,93	5,19	6,31	6,79	6,74
9.	Kota Denpasar	2,20	2,21	1,79	1,52	2,07	2,21	2,39
	Provinsi Bali	4,88	5,67	4,59	3,95	4,49	4,76	4,74

Sumber: BPS Provinsi Bali

Dapat dilihat dalam Tabel 1 bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Bali di lihat dari tahun 2009-2015 kabupaten/kota mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, Kabupaten Karangasem masih menjadi kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali. Sebanyak 7,44 persen penduduk Karangasem masih dikategorikan miskin. Kabupaten/kota lainnya yang mengikuti kategori persentase tertinggi adalah Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Buleleng, masing-masing tercatat 6,91 persen dan 6,74 persen. Sebaliknya, persentase kemiskinan terendah berada di Kabupaten Badung dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,33 persen, disusul oleh Kota Denpasar sebesar 2,39 persen dan Kabupaten Gianyar sebesar 4,61 persen. Kabupaten lainnya, tingkat kemiskinannya berada pada kisaran 5-6 persen.

Provinsi Bali mempunyai struktur perekonomian sangat unik dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Keunikan ini karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor pariwisata, sedangkan sektor lainnya berperan sebagai sektor pendukung (BPS Provinsi Bali). Provinsi Bali secara bertahap telah berupaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui strategi yang dilakukan dengan pelaksanaan program pro-rakyat serta memberikan sarana yang memadai untuk mampu mengakses dan memenuhi berbagai pelayanan kebutuhan masyarakat seperti program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), dan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbang Sadu) (Astrini, 2013).

Berdasarkan data tersebut, bahwa persentase penduduk miskin per kabupaten/kota di Provinsi Bali masih mengalami ketimpangan atau ketidakmerataan. Angka kemiskinan di Provinsi Bali perlu untuk dikurangi atau ditekan dengan beranjak dari peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) sehingga mampu dan memiliki keterampilan untuk siap bersaing dan mendapatkan pekerjaan demi pemenuhan kebutuhan hidup dan pemberdayaan sumber daya alam

(SDA) sehingga mencukupi dan memadai serta dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi ini diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi makanan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pakaian yang tidak layak, dan sebagainya (Patera, 2015). Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lainnya yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik (Benazir, 2017).

Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia, dan pada jangka yang lebih panjang dapat mengakibatkan hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara (Budhi, 2013).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Wahyudi, 2010).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila

kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno, 2003).

Sejumlah penelitian empiris yang menganalisis pengaruh variabel-variabel ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan yang dilakukan antara lain oleh Cutler dan Katz (1991), dan Powers (1995) menemukan adanya hubungan yang kuat antara tingkat kemiskinan dengan berbagai variabel ekonomi makro. Penelitian-penelitian tersebut juga membuktikan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan; semakin tinggi tingkat pengangguran semakin besar tingkat kemiskinan. Pengangguran memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kemiskinan. Hoover dan Wallace (2003), menemukan bahwa tingkat kemiskinan sangat responsif terhadap kondisi pasar tenaga kerja (tingkat pengangguran dan upah).

Masalah pengangguran merupakan masalah yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan atau seorang yang sedang berusaha mendapat pekerjaan yang layak. Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia tertentu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan agar memperoleh upah atau keuntungan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada (Sukirno, 2004: 327).

Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan tingginya jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan menjadi meningkat apabila tidak didukung dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi penduduk usia kerja. Apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak akan diikuti dengan banyaknya jumlah

tenaga kerja yang terserap. Apabila tidak tersedia lapangan kerja yang memadai akan meningkatkan jumlah kemiskinan yang berakibat pada tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun (Wiradyatmika, 2013).

Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan yang tidak terelakkan keberadaannya, baik itu di negara berkembang maupun di negara maju sekalipun. Masalah pengangguran sangat penting untuk diperhatikan karena pengangguran sangat berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejala sosial, politik dan kemiskinan (Cang dan Wu, 2012).

Data menunjukkan bahwa kebijakan pasar tenaga kerja yang cenderung melindungi mereka yang bekerja di sektor formal tidak mungkin banyak mengurangi kemiskinan (Alisjahbana dan Manning, 2006). Angka Kemiskinan dan Pengangguran biasa digunakan untuk melihat bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan bangsa ini yaitu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, maka kemiskinan dan pengangguran menjadi sebuah komitmen bersama bagi seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat untuk berupaya keras dalam penanggulangan masalah tersebut. Pengangguran akan menjadi beban tersendiri, tidak hanya bagi pemerintah, namun juga berdampak terhadap keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya (Amalia, 2012).

Arsyad (1997), menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari

pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin.

Sama juga halnya adalah, banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh per hari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin. Sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Instrumen yang sangat berpengaruh dalam penurunan kemiskinan pendapatan (*income poverty*) adalah pertumbuhan ekonomi (Wahyudi, 2010). Studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah pro-poor.

Menurut Mankiw (1995), menjelaskan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, hal tersebut membuat perusahaan menambah produksi barang dan jasa. Peningkatan upah yang di dapat oleh tenaga kerja dikarenakan meningkatnya

produksi barang dan jasa tersebut, sehingga pendapatan yang meningkat membuat taraf hidup layak mereka meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran terhadap kesejahteraan, dimana faktor produksi yang turut serta menciptakan kesejahteraan tersebut, artinya semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan semakin tinggi pula upah yang diterima oleh para pekerja (Yudha, 2013).

Pertumbuhan ekonomi yang cepat ini sebagian disebabkan oleh peningkatan dalam hal perdagangan, terutama karena peningkatan posisi keuangan pemerintah menaikkan tingkat investasi. Tetapi bagian dari itu juga karena tingkat kemajuan teknis yang tinggi, terutama di bidang pertanian, dan kebijakan fiskal pemerintah dalam negeri yang ekspansif (Sundrum, 1986).

Setiap Negara akan berusaha keras untuk mencapai keberhasilan pembangunan suatu negara dengan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Jonaidi, 2012). Masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kemiskinan (Vincent, 2009).

Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), dan Prasetyo (2010), menemukan bahwa terdapat hubungan serta pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan penggerak utama dalam penurunan kemiskinan (Fosu, 2010). Pertumbuhan ekonomi memerlukan unsur investasi. Kenyataan bahwa investasi merupakan komponen penting dalam pendapatan

nasional dan pertumbuhan ekonomi (Adnan, 2010). Investasi adalah komitmen dana, langsung atau tidak langsung, untuk satu atau lebih asset dengan harapan untuk meningkatkan kekayaan masa depan (Lutfi, 2010). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin besar pula investasi suatu negara, semakin tingginya investasi, pengangguran akan menurun, apabila tingkat pengangguran rendah maka akan berbanding lurus terhadap penurunan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan Purbadharmaja (2015), menemukan bahwa investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Sharp, seperti dikutip Kuncoro (2006), yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dimana peningkatan investasi akan disertai dengan pengurangan kemiskinan. Investasi memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan, hal ini dikarenakan investasi yang masuk dalam suatu daerah akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah tersebut selain itu investasi yang tertanam juga akan menyebabkan meningkatnya pembangunan di daerah tersebut yang akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan berkurangnya kemiskinan di daerah tersebut. Investasi yang berupa pembelian stok barang-barang modal juga akan menambah kemampuan masyarakat untuk memproduksi sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut dan berujung juga pada pengurangan penduduk miskin di daerah tersebut.

Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja, (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Investasi

merupakan modal yang biasanya ditujukan untuk jangka panjang, penanaman modal dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha sendiri atau menyertai pada pihak lain. Penanaman modal usaha untuk memperoleh keuntungan yang penanamannya dapat berbentuk uang, modal tetap atau pembelian surat berharga.

Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi laju perubahan kemiskinan; faktor-faktor lain juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan orang miskin, serta memiliki efek tidak langsung melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri, di antara yang kritis adalah infrastruktur, modal manusia, insentif harga pertanian dan akses ke teknologi. Sementara mendorong pertumbuhan ekonomi sangat penting, strategi pengurangan kemiskinan yang lebih lengkap harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan ini (Balisacan *et al*, 2003).

Apabila penurunan kemiskinan adalah salah satu tujuan utama pemerintah, maka kebijakan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan memperhitungkan dampak pertumbuhan ekonomi yang mungkin terjadi pada ketimpangan (De Silva dan Sumarto, 2014). Penurunan ketimpangan disertai dengan naiknya PDB per kapita secara cepat dapat mengangkat sebagian besar proporsi populasi ke atas garis kemiskinan (Leeuwen dan Foldvari, 2016).

Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya *et al*, 2012). Pertumbuhan ekonomi, investasi, pengangguran dan kemiskinan satu sama lain saling terkait. Sulit bagi pemerintah menciptakan lapangan kerja baru tanpa pertumbuhan ekonomi tinggi maka tingkat pengangguran juga akan meningkat. Kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012).

Menurut Arsyad (2016), Secara teoritis pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan sebuah skema pengurangan angka pengangguran. Pertumbuhan

ekonomi yang tinggi diharapkan akan menciptakan pertumbuhan output, sehingga dibutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengejar kapasitas output yang meningkat itu. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun (*Okun's Law*) mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah tingkat penganggurannya, dan sebaliknya. Menurut teori ekonomi, terapi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang “berkualitas” dan “berkesinambungan”. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu menyediakan kesempatan kerja yang cukup besar yaitu pertumbuhan ekonomi yang di picu oleh banyaknya investasi yang bersifat padat tenaga kerja, bukan yang bersifat padat modal.

Tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. 3) Untuk menganalisis pengaruh pengangguran sebagai variabel *intervening* dari pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan sebagai berikut; 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi ataupun pengetahuan bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran dan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan di negeri ini (Pemerintah). Apabila pertumbuhan ekonomi dan investasi memberi pengaruh yang berarti bagi terciptanya pengangguran dan kemiskinan, diharapkan kebijakan yang dikeluarkan

dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi dan investasi sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali dengan menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terkait dengan objek penelitian. Dipilihnya lokasi ini, karena persentase penduduk miskin per kabupaten/kota di Provinsi Bali masih mengalami ketimpangan atau ketidakmerataan. Titik pengamatan dalam penelitian ini adalah dalam rentang waktu tahun 2009-2015 di 9 kabupaten/kota Provinsi Bali dengan menggunakan data panel (*time series dan cross section*).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Bali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi non perilaku, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya bertindak sebagai pengamat independen. Data dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur (*path analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Pengujian struktur pertama yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran di kabupaten/kota provinsi bali. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap pengangguran, pengujian dilakukan dengan SPSS versi 24. Menurut hasil

olahan SPSS, maka laporan hasil analisis regresi persamaan substruktural I ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y_1 = -0,044 X_1 + 0,053 X_2 + e_1$$

$$Sb = (0,238) \quad (0,064)$$

$$t = (-0,321) \quad (0,389)$$

$$sig = (0,749) \quad (0,699)$$

$$R^2 = 0,003$$

$$F = 0,096$$

Keterangan:

Y_1 = Pengangguran

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Investasi

e_1 = Nilai kekeliruan standar

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Pengujian struktur kedua yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota provinsi bali. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengangguran terhadap kemiskinan, pengujian dilakukan dengan SPSS versi 24. Menurut hasil olahan SPSS, maka laporan hasil analisis regresi persamaan substruktural II ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y_2 = -0,524 X_1 + -0,369 X_2 + -0,124 Y_1 + e_2$$

$$Sb = (0,249) \quad (0,067) \quad (0,135)$$

$$t = (-5,679) \quad (-3,995) \quad (-1,431)$$

$$sig = (0,000) \quad (0,000) \quad (0,158)$$

$$R^2 = 0,557$$

$$F = 24,726$$

Keterangan:

Y_2 = Kemiskinan

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Investasi

Y_1 = Pengangguran

e_2 = Nilai kekeliruan standar

Berdasarkan hasil pengujian persamaan substruktural I serta hasil pengujian persamaan substruktural II, maka adapun ringkasan hasil pengujian ditunjukkan dengan Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Pengujian Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel

Regresi	Koefisien Regresi Standar	Standar Error	t. Hitung	P. Value	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	-0,044	0,238	-0,321	0,749	Tidak Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,053	0,064	0,389	0,699	Tidak Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0,524	0,249	-5,679	0,000	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	-0,369	0,067	-3,995	0,000	Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-0,124	0,135	-1,431	0,158	Tidak Signifikan

Keterangan:

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_2 = Investasi

Y_1 = Pengangguran

Y_2 = Kemiskinan

Untuk memeriksa validitas model menggunakan koefisien determinasi total, hasilnya sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - (e_1^2) (e_2^2)$$

$$R^2_m = 1 - (0,998^2) (0,665^2)$$

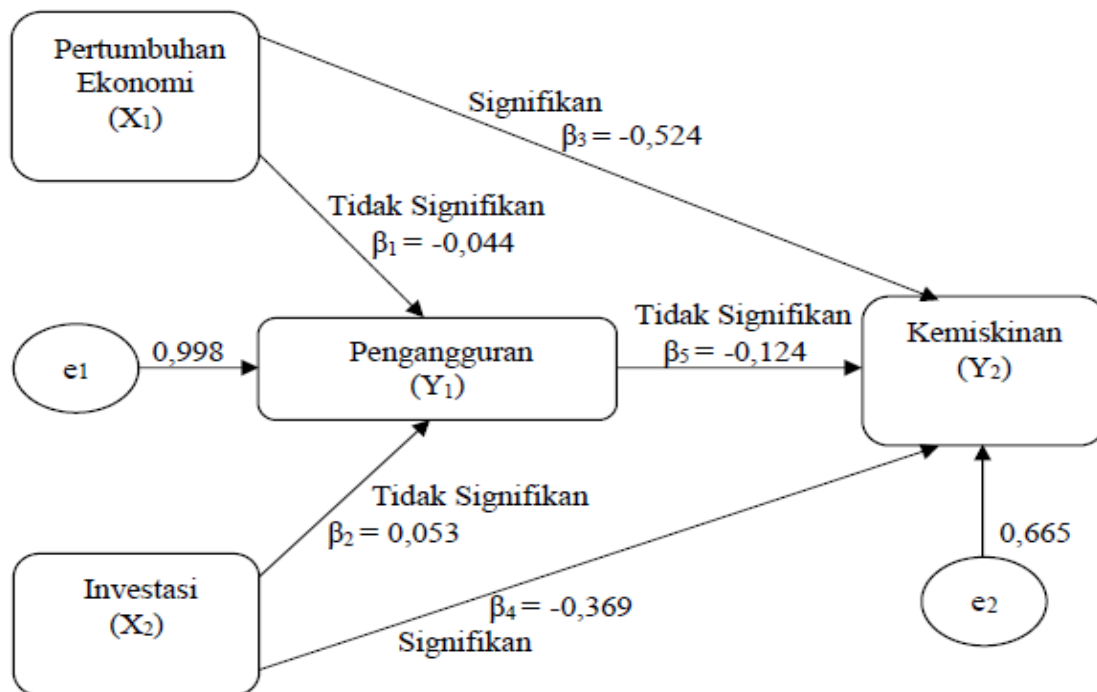
$$R^2_m = 1 - (0,996004) (0,442225)$$

$$R^2_m = 1 - (0,440)$$

$$R^2_m = 0,56$$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 0,56 atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 56 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya 44 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Berdasarkan ringkasan koefisien jalur, maka dapat digambarkan diagram hasil analisis jalur sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Hasil Analisis Jalur Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan Gambar 1 dapat dihitung pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total antar variabel yang dijelaskan pada Tabel 3.

Berdasarkan uraian Tabel 3 dapat diketahui nilai pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran sebesar -0,044. Pengaruh langsung investasi terhadap pengangguran sebesar 0,053. Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi

Tabel 3. Ringkasan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan Pengaruh Total Antar Variabel Penelitian

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung melalui Y_1	
$X_1 \rightarrow Y_1$	-0,044	-	-0,044
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,053	-	0,053
$X_1 \rightarrow Y_2$	-0,524	0,006	-0,518
$X_2 \rightarrow Y_2$	-0,369	-0,006	-0,375
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-0,124	-	-0,124

terhadap kemiskinan sebesar -0,524. Pengaruh langsung investasi terhadap kemiskinan sebesar -0,369. Pengaruh langsung pengangguran terhadap kemiskinan sebesar -0,124. Pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui pengangguran adalah sebesar 0,006. Pengaruh tidak langsung investasi terhadap kemiskinan melalui pengangguran adalah sebesar -0,006.

Pengujian Pengaruh Langsung

Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,044 dengan nilai signifikansi 0,749 lebih besar dari 0,05 berarti H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Suwandika dan Mahaendra Yasa (2015) serta Santosa

(2013), berdasarkan hasil analisisnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Tingginya pertumbuhan ekonomi dirasakan tidak memberikan pemecahan masalah terhadap tingkat pengangguran, karena masih cenderungnya proses produksi berbentuk padat modal (*capital intensive*) sehingga hanya dapat menyerap sedikit tenaga kerja dan tidak dapat menekan tingginya tingkat pengangguran.

Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,053 dengan nilai signifikansi 0,699 lebih besar dari 0,05 berarti H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali. Nilai *standardized coefficient beta* menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif investasi dengan pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali, dimana hasil ini berlawanan dengan teori dan hipotesis di awal yang menyatakan investasi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mentari dan Mahaendra Yasa (2016), dimana dalam penelitiannya di kabupaten/kota Provinsi Bali investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, yang berarti ketika jumlah investasi di kabupaten/kota Provinsi Bali meningkat, maka tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali juga meningkat, hal ini didukung oleh teori investasi yang padat modal, dengan investasi yang ditanamkan bersifat padat modal atau dengan kata lain perusahaan lebih memilih untuk menggunakan tenaga mesin untuk memproduksi daripada tenaga manusia guna melakukan efisiensi tenaga kerja sehingga kenaikan investasi tidak berpengaruh terhadap pasar tenaga kerja dan tenaga kerja yang tersedia tidak mampu terserap oleh pasar tenaga kerja.

Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,524 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, artinya setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan jumlah kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mankiw (1995), menjelaskan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, hal tersebut membuat perusahaan menambah produksi barang dan jasa. Peningkatan upah yang di dapat oleh tenaga kerja dikarenakan meningkatnya produksi barang dan jasa tersebut, sehingga pendapatan yang meningkat membuat taraf hidup layak mereka meningkat dan terbebas dari kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Prasetyo (2010), menyatakan variabel pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menurunkan tingkat kemiskinan perlunya memacu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,369 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, artinya setiap kenaikan investasi akan menurunkan jumlah kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Paramita dan Purbadharmaja (2015), yang memberikan hasil bahwa investasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Sharp, seperti dikutip Kuncoro (2006), yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana peningkatan investasi akan disertai dengan pengurangan kemiskinan.

Investasi memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan, hal ini dikarenakan investasi yang masuk dalam suatu daerah akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di daerah tersebut selain itu investasi yang tertanam juga akan menyebabkan meningkatnya pembangunan di daerah tersebut yang akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan berkurangnya kemiskinan di daerah tersebut. Investasi yang berupa pembelian stok barang-barang modal juga akan menambah kemampuan masyarakat untuk memproduksi sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut dan berujung juga pada pengurangan penduduk miskin di daerah tersebut.

Pengaruh Langsung Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0,124 dengan nilai signifikansi 0,158 lebih besar dari 0,05 berarti H_0 diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangguran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Nilai *standardized coefficient beta* menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif pengangguran dengan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, dimana hasil ini berlawanan dengan teori dan hipotesis di awal yang menyatakan pengangguran secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Darma Putra dan Murjana Yasa (2018), dimana dalam penelitiannya di kabupaten/kota Provinsi Bali pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan namun memiliki hubungan yang negatif, yang berarti ketika tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali meningkat maka tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali menurun.

Menurut Yacoub (2012), kondisi ini dapat digambarkan dalam suatu rumah tangga yang terdiri dari beberapa anggota rumah tangga hanya satu orang yang bekerja dan memenuhi semua kebutuhan anggota rumah tangga tersebut. Mereka yang tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin ialah mereka yang bisa memenuhi kebutuhan dari orang yang bekerja dengan waktu yang normal. Penduduk yang sudah kaya dari harta keluarganya sehingga mereka masih memilih pekerjaan yang cocok untuk mereka, tanpa tergesa-gesa mencari pekerjaan, karena tanpa bekerja mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan mereka dari kekayaan keluarganya tersebut.

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Untuk mengetahui apakah pengangguran merupakan variabel *intervening* dari pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{\beta_5^2 S\beta_1^2 + \beta_1^2 S\beta_5^2}$$

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{(-0,193^2)(0,238^2) + (-0,077^2)(0,135^2)}$$

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{(0,037249 \times 0,056644) + (0,005929 \times 0,018225)}$$

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{0,002109932356 + 0,000108056025}$$

$$S\beta_1\beta_5 = \sqrt{0,002217988381}$$

$$S\beta_1\beta_5 = 0,047$$

Berdasarkan perhitungan $S\beta_1\beta_5$ maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai Z dari koefisien $S\beta_1\beta_5$ dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_1\beta_5}{S\beta_1\beta_5}$$

$$Z = \frac{(-0,077)(-0,193)}{0,047}$$

$$Z = 0,316$$

Oleh karena nilai Z hitung sebesar $0,316 < 1,96$ hal ini berarti H_0 diterima, dengan demikian, pengangguran bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pengaruh Tidak Langsung Investasi Terhadap Kemiskinan Melalui Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Untuk mengetahui apakah pengangguran merupakan variabel *intervening* dari pengaruh investasi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali dapat dihitung dengan rumus:

$$S\beta_2\beta_5 = \sqrt{\beta_5^2 S\beta_2^2 + \beta_2^2 S\beta_5^2}$$

$$S\beta_2\beta_5 = \sqrt{(-0,193^2)(0,064^2) + (0,025^2)(0,135^2)}$$

$$S\beta_2\beta_5 = \sqrt{(0,037249 \times 0,004096) + (0,000625 \times 0,018225)}$$

$$S\beta_2\beta_5 = \sqrt{0,000152571904 + 0,000011390625}$$

$$S\beta_2\beta_5 = \sqrt{0,000163962529}$$

$$S\beta_2\beta_5 = 0,013$$

Berdasarkan perhitungan $S\beta_2\beta_5$ maka untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai Z dari koefisien $S\beta_2\beta_5$ dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{\beta_2\beta_5}{S\beta_2\beta_5}$$

$$Z = \frac{(0,025)(-0,193)}{0,013}$$

$$Z = -0,371$$

Oleh karena nilai Z hitung sebesar $-0,371 < 1,96$ hal ini berarti H_0 diterima, dengan demikian, pengangguran bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh investasi terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

SIMPULAN

- 1) Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Sedangkan Pengangguran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Pengangguran bukan sebagai variabel *intervening* dari pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali.

SARAN

- 1) Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Untuk itu, dalam strategi pembangunan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota Provinsi Bali perlu ditekankan pendekatan ekonomi sektoral, khususnya sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, seperti; peningkatan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, hotel serta restoran. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali cenderung meningkat dan sebab itu memacu pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi jika disertai dengan pendistribusian pendapatan yang merata akan memberikan efek yang lebih maksimal terhadap pengurangan kemiskinan. Pemerintah kabupaten/kota

Provinsi Bali dalam hal ini agar dapat lebih mengenalkan lagi investor terhadap sektor-sektor lain di kabupaten/kota Provinsi Bali yang belum disentuh dan mempunyai potensi untuk berkembang bila di investasikan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat merata ke daerah-daerah yang belum di sentuh oleh investor dan tidak terfokus ke daerah itu-itu saja. Selain itu pemerintah juga harus membatasi investasi pada daerah yang pertumbuhannya sudah tinggi dan menyebarkan investasi beserta infrastruktur pendukungnya pada daerah yang jarang mendapatkan investasi dalam upaya mengurangi arus urbanisasi sebagai salah satu penyebab pengangguran. Langkah kebijakan yang perlu juga dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali, dengan cara; peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan kerja sehingga tercipta tenaga kerja yang berkualitas, perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan ke luar negeri, serta pemetaan potensi tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali harus sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

- 2) Melihat begitu besarnya pengaruh investasi dalam hal penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali maka sudah sepantasnya pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Bali melakukan usaha atau langkah-langkah guna peningkatan nilai investasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah; (i) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi terlaksananya berbagai proyek investasi dalam negeri. Penyederhanaan birokrasi/proses pengurusan izin-izin dan adanya keterpaduan koordinasi kebijakan investasi di tingkat pemerintah daerah, stabilitas ekonomi yang mantap, penegakan supremasi hukum, penambahan dan perawatan infrastruktur serta faktor keamanan yang kondusif; merupakan faktor penting yang menjamin para investor dalam menanamkan modalnya terutama pada daerahnya sendiri. (ii) Dalam upaya menarik investor asing untuk

menginvestasikan modalnya ke kabupaten/kota Provinsi Bali, sistem informasi mengenai potensi daerah-daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali harus lebih ditingkatkan lagi mengingat di era otonomi daerah pembangunan lebih difokuskan di tingkat kabupaten/kota. Adanya sistem informasi yang lengkap, mudah diakses dan relatif canggih tentang potensi daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali akan membuka peluang investasi yang lebih besar.

REFERENSI

- Adnan, P. Eko Prasetyo. 2010. Investment on The Community Income and The Economic Growth in Central Java. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura, Volume 13, Universitas Negeri Malang*.
- Alcock, Pete. 2012. Poverty and Social Exclusion. *The Student's Companion to Social Policy*. Fourth Edition, pp: 26-186.
- Alisjahbana, Armida S., and Manning, Chris. 2006. Labour market dimensions of poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 42. No. 2, 235-261.
- Amalia, Fitri. 2012. Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2001-2010. *Jurnal Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Arsyad, Lincoln. 1992. Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia: *Suatu Pengantar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 1, Tahun VII.
- . 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- . 2016. *Ekonomi Pembangunan (Edisi Lima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astrini, A. N. M. M., dan Purbadharmaja, I. B. P. 2013. Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 2019. *Publikasi & Berita Resmi Statistik; Bali Dalam Angka 2009-2015*. Denpasar: <https://bali.bps.go.id/>.

- Balisacan, Arsenio M., Pernia, Ernesto M., and Asra, Abuzar. 2003. Revisiting growth and poverty reduction in Indonesia: what do subnational data show?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 39. No. 3, 329-351.
- Benazir and Aryansyah. 2014. analysis of factors that influence poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.26 No.4-5. Pp 430-445.
- Boediono. 2002. *Ekonomi Mikro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, No. 1 (Edisi Dua). Yogyakarta: BPFE.
- Budhi, Made Kembar Sri. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 6, No. 1, pp: 1-6.
- Cahyo, Adi Nur. 2013. *Belajar Praktis Sosiologi*. Klaten, Jawa Tengah: Viva Pakarindo.
- Cang, Juin-jen., and Wu, Chi-Hsin. 2012. Crime, Job Searches, and Economic Growth, *International Atlantic Economic Society*, pp:1-20.
- Cutler, David M., and Lawrence F. Katz. 1991. Macroeconomic Performance and the Disadvantaged. *Brookings Paper on Economic Activity*.
- Darma Putra, I. K. Y., dan Murjana Yasa, I. G. W. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Umr Terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 7, No. 11, pp: 2309-2548.
- De Silva, Indunil., and Sumarto, Sudarno. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 50. No. 2, 227-242.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Fosu, Augustin Kwasi. 2010. Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries: Recent Global Evidence. *CSAE Working Paper WPS, 07*.
- Frans Seda. 1986. *Menguak Mitos-mitos Pembangunan. Telaah Etis dan Kritis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Hoover, Gary A., and Wallace, Geoffrey L. 2003. Examining the Relationship between the Poverty Rate and Economic Conditions: A Comparison of the 1980s-1990s. The University of Alabama. *Economic, Finance and Legal Working Paper Series*.
- Ikhsan, Arfan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol 1, No 1.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- . 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Leeuwen, Bas van., and Foldvari, Peter. 2016. The Development of Inequality and Poverty in Indonesia, 1932–2008. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 52. No. 3, 379-402.
- Lutfy. 2010. The Relationship Between Demographic Factors and Investment Decision in Surabaya. *Journal of Economics, Business, and Accountancy ventura*, Volume 13, No.3, pages 213-224. STIE Perbanas Surabaya.
- Mankiw, N. Gregory. 1995. The Growth of Nations. *Brookings Papers on Economic Activity*, (1), 275-326.
- . 2000. *Teori Ekonomi Makro (Edisi Empat)*. Jakarta: Erlangga.
- Mentari, N. W., dan Mahaendra Yasa, I. N. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 5, No. 6, pp: 652-728.

- M. Muh. Nasir, Saichudin., dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*. Jakarta: Lipi.
- Ocaya, Bruno., Charles Ruranga., and William Kaberuka. 2012. Dynamic Relationship between Gross Domestic Product and Domestic Investment in Rwanda. *World Journal of Education*. 2(6). Makerere University, Uganda.
- Paramita, A. A. I. D., dan Purbadharmaja, I. B. P. 2015. Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 4, No. 10, pp: 1194-1327.
- Patera, I Made., dan Suardana, I Wayan. 2015. Model Hubungan Pariwisata, Kinerja Perekonomian dan Kemiskinan di Kabupaten Badung Bali. *PIRAMIDA*, Vol. XI No. 2: 95-105.
- Powers, Elizabeth T. 1995. Growth and Poverty Revisited. *Federal Bank of Cleveland, Economic Commentary*.
- Prasetyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Studi Kasus 35 Kabupaten/kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007). *Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- Riduwan dan Kuncoro. 2008. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.
- Robinson Tarigan. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sani, Ahmad., dan Maharani, Vivin. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori, Kuesioner, dan Analisis Data*. Malang: Uin Press.
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran, dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Vol. 5, No. 2.
- Sharp, Ansel M., Charles A. Register., and Paul W. Grimes. 1996. *Economics of Social Issues* (12th edition). New York: Irwin/Mcgraw-Hill.

- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali pers.
- . 1997. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 1999. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2000. *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2004. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar (Edisi Tiga)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2005. *Ekonomi Mikro, Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sundrum, R. M. 1986. Indonesia'S Rapid Economic Growth: 1968–81. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 22. No. 3, 40-69.
- Suwandika, P. E., dan Mahaendra Yasa, I. N. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 4, No. 7, pp: 746-872.
- Suyana Utama, I Made. 2016. *Buku Ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.
- Tambunan, Tulus H. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi Delapan)*. Jakarta: Erlangga.
- Vincent, Brian. 2009. The Concept Poverty towards Understanding in the Context of Developing Countries Poverty qua Poverty. *Journal of Sustainable Development*, 2(2).

- Wahyudi, Suliswanto M. S. 2010. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Brawijaya Malang*.
- Wiradyatmika, A. A. G. A., dan Sudiana, I Ketut. 2013. Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja, dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.
- Wongdesmiwati. 2009. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika. *Jurnal Ekonomi*.
- Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak*.
- Yudha, O. R. Pranata. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang*.
- Yuliarmi, N. N. 2014. Keberdayaan Industri Kerajinan Rumah Tangga Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali (Ditinjau Dari Aspek Modal Sosial Dan Peran Lembaga Adat). *Jurnal PIRAMIDA*, 10 (1), 19–28.